

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *shareholders* (Widyatama, Novita, & Diarespati, 2017). Bagi pemerintah hal tersebut dinilai sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. (Widyatama, Novita, & Diarespati, 2017).

Dana desa diberikan berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pemerintah desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 tahun terakhir sebesar Rp.127,75 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 Triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun (djpk.kemenkeu, 2018).

Dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa secara khusus diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57%. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Pengelolaan dana desa yang baik harus ditunjang dengan kompetensi perangkat desa yang baik *Accountability Framework* dalam faktor Individu dan sistem pemerintahan menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas (Widyatama, Novita, & Diarespati, 2017). Kompetensi yang dimiliki Pengelola dana desa menjadi syarat utama dalam akuntabilitas dana desa agar bisa berjalan dengan maksimal. Sistem pengendalian yang digunakan sangat mendukung keberhasilan akuntabilitas dana desa. Kompetensi aparatur merupakan faktor internal dan menjadi suatu faktor yang penting bagi akuntabilitas keuangan.

Ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar, dibutuhkan kompetensi aparatur di pemerintah desa yang mumpuni. Seperti dana desa yang diperoleh desa di kecamatan jabung kabupaten lampung timur sebesar 1 milyar tentunya diperlukan pengelolaan yang baik. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. "Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah di Kantor ICW, Jakarta, Selasa, (18/2/2020). (Kompas.com, 2020).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Lampost.co. Rabu, 23 Oktober 2019. Kejaksaan Negeri Lampung Timur hingga Oktober 2019 telah menangani tiga kasus korupsi dana desa di kabupaten setempat. Sebanyak tiga kades terseret kasus menyalahgunakan dana dari pusat tersebut, kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Rizal Syah Nyaman, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Akhmad Rafliansyah Pasra. Ia menjelaskan, dari tiga kades tersebut, dua diantaranya sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, di Bandar Lampung dan satu lagi kini sedang dalam penanganan oleh pihak Kejari Lamtim.

Penelitian tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia memperoleh hasil yang beragam

sehingga menarik untuk ditelaah lebih jauh. Penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020) tentang faktor-faktor yang berpengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Memperoleh hasil sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Wijaya (2019), Aziiz dan Prasisti (2019), Sweetenia dan Caesari dan Aprilia dan Purwatini (2019), juga memperoleh hasil yang sama. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Setiana dan Yulianini (2017), widyatama, Novita dan Diarespati (2017) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perangkat desa dan kompetensi aparatur dari pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2018), dengan persamaan menggunakan sistem pengendalian internal, sedangkan perbedaan yang pertama yaitu menambahkan variabel kompetensi aparatur agar penilaian terhadap pengelolaan dana desa dapat lebih akurat. Perbedaan yang kedua yaitu pada lokasi penelitian dan sampel yang digunakan pada penelitian ini terletak di Desa Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Dari latar belakang diatas, maka judul pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah?

1. Apakah kompetensi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa, kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung timur?
2. Apakah sistem pengendalian internal dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa, kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan peran kompetensi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa, kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk menjelaskan peran sistem pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa, kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Diharapkan bisa menjadi masukan kepada mahasiswa yang membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan dana desa yang digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah pemahaman ilmu pengetahuan mengenai

kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan tingkat pendidikan pengelolaan dana desa.

2. Bagi Penulis

Wawasan ilmu pengetahuan harus ditingkatkan, berkaitan dengan pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan pemanfaatan pengendalian tingkat pendidikan teknologi informasi pada tingkat pendidikan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

3. Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa sebagai unit analisis penelitian, harapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen tingkat dana desa yang digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah tingkat desa dalam pengelolaan dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat mudah dipahami skripsi tersusun dalam lima bab yang masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu yang tetap berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang mengenai gambaran umum objek penelitian, serta analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian, sebagai masukan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.